BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Produk asuransi JS. Proteksi Extra Income memberikan perlindungan bagi nasabahnya termasuk juga menjamin adanya perlindungan hukum. Upaya pemberian perlindungan hukum yang dilakukan adalah berupa pemberian hak kepada nasabah berdasarkan pada ketentuan yang tertera dalam Lampiran Jaminan Tambahan *Critical Illness*. Namun pada kenyataannya, tidak semua nasabah mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Lampiran Jaminan Tambahan *Critical Illness* tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dibentuk untuk mengatur kegiatan perasuransian, akan tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tersebut belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi, sehingga dibutuhkan Undang-Undang lain yang selaras dan mampu untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Produk asuransi JS. Proteksi Extra Income memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan produk asuransi lain yang berada di

bawah naungan PT. Asuransi Jiwasraya. Kelebihan yang dimiliki produk JS. Proteksi Extra Income dapat dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh berupa tambahan nilai deposito secara kumulatif sesuai dengan program yang telah ditetapkan yaitu setiap tahun selama masa asuransi.

3. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi berasal dari dua faktor, pertama karena adanya faktor dari nasabah dan perusahaan asuransi yang melakukan tindakan wanprestasi. Kedua, adanya faktor dari pengaturan perundang-undangan yang berperan sebagai payung hukum bagi nasabah yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian hanya memandang asuransi sebagai sebuah bisnis dengan tidak memberikan kejelasan mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah selaku anggota masyarakat pemakai jasa asuransi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum adalah dengan menggunakan Undang-Undang lain yang selaras dan mampu melengkapi kekurangan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan sebagai penyedia jasa asuransi dapat melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum

bagi nasabahnya dengan cara melakukan evaluasi dan identifikasi berkaitan dengan kemudahan dalam memberikan penggantian uang premi kepada nasabah.

2. Nasabah sebagai pihak bertanggung sebaiknya melakukan pengecekan secara berkala setiap tahun selama masa asuransi mengenai transparansi data untuk mencegah terjadinya tindakan wanprestasi di kemudian hari. Bagi masyarakat yang ingin menanggihkan irinya melalui mekanisme asuransi, sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai produk asuransi yang akan diikuti, yaitu seputar keuntungan yang diperoleh serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh produk asuransi tersebut.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebaiknya di amandemen dengan menambahkan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan nasabah sebagai pemakai jasa asuransi untuk menghindari ketidakjelasan yang selama ini terjadi mengenai bentuk pemberian perlindungan hukum bagi nasabah asuransi.